

Ikhtisar Webinar

# **Skenario Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dan Proyeksi Kebijakan Indonesia 2045**



# Skenario Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dan Proyeksi Kebijakan Indonesia 2045

22 Desember 2021 | 10.00-12.00

Webinar tentang skenario hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta proyeksi kebijakan Indonesia hingga tahun 2045 mendatang dimoderatori oleh Mutti Anggita dan dibuka oleh Iis Gindarsah. Diskusi daring ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya: (1) Ali Wibisono sebagai ketua tim pengkaji dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Centre for International Relations Studies (CIReS); (2) Broto Wardoyo dan (3) Muhammad Arif sebagai anggota pengkaji dari LAB 45 dan CIReS; (4) Klaus Henrich Raditio sebagai peneliti independen dan alumnus *University of Sydney*; serta (5) Adrianus Harsawaskita dari Universitas Katolik Parahyangan. Dua nama terakhir berperan sebagai penanggap atas laporan penelitian yang bertajuk 'Skenario Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dan Proyeksi Kebijakan Indonesia 2045'.

Broto Wardoyo memaparkan temuan - temuan utama penelitian yang diikuti dengan sikap kebijakan Indonesia dalam menghadapinya hingga 2045. Melalui teori transisi kekuatan, interdependensi, dan kompetisi, sekaligus memperhitungkan kepemimpinan nasional, ditemukan bahwa ketergantungan antar AS dan Tiongkok menurun sejak periode 2010 sehingga menimbulkan pertanyaan kecenderungan hubungan keduanya untuk jatuh pada kondisi *mutual threat* atau hanya kompetisi. Selain itu, periode yang sama juga menunjukkan kepemimpinan di AS dan Tiongkok yang semakin *hawkish*. Dalam kapabilitas relatif seperti tingkat PDB yang tentunya mempengaruhi anggaran pertahanan dan modernisasi militer, kesenjangan antar AS dan Tiongkok dikaji semakin sempit. Penelitian pun menemukan beberapa asimetrisme sebagai berikut: (a) capaian strategis AS mengarah ke pencegahan ekspansi kendali teritorial sedangkan Tiongkok mengarah ke pencegahan intervensi; (b) politik aliansi AS bersifat formal dan militeristis sedangkan Tiongkok berkarakter informal, ekonomi, dan keamanan; (c) kepentingan strategis AS merupakan menjaga keamanan aliansi sedangkan Tiongkok berkepentingan untuk mengamankan wilayah, reunifikasi Taiwan, dan keselamatan Korea Utara. Dalam interdependensi AS-Tiongkok, ditemukan terjadinya *decoupling* dalam sektor perdagangan di mana

kedua belah pihak menginginkan pengurangan ketergantungan agar mencegah utilisasi instrumen ekonomi yang koersif. Secara politik domestik, kedua negara dilihat berpotensi menuju instabilitas.

Berangkat dari uji statistik data, pengukuran tingkat pengaruh variabel dinyatakan kurang konklusif sehingga menyulitkan penyusunan skenario. Walaupun demikian, penelitian berhasil memetakan potensi skenario berdasarkan tingkat interdependensi, polaritas, dan karakteristik kepemimpinan baik *dovish* ataupun *hawkish*. Kajian dari tiga variabel tersebut dapat kemudian menunjukkan arah relasi dengan skenario berikut: (1) jika interdependensi rendah, polaritas rendah/unipolar, dan kepemimpinan *dovish* maka cenderung kompetisi; (2) jika interdependensi kuat, polaritas rendah, dan kepemimpinan *dovish* maka terjadi perdamaian layaknya *strategic triangle* AS-Tiongkok-Rusia; (3) jika interdependensi rendah, polaritas tinggi/bipolar, dan kepemimpinan *hawkish*, maka kondisi cenderung perang/konflik ditandai dengan instabilitas bentrokan - bentrokan kecil di berbagai titik; (4) jika interdependensi tinggi, polaritas tinggi/bipolar, dan kepemimpinan *hawkish*, maka cenderung terjadi persaingan ditandai dengan kondisi *balance of power* antara polar kekuatan. Skenario potensial tersebut mendorong Indonesia untuk mengidentifikasi modalitasnya sebagaimana Indonesia dikenal sebagai negara yang netral dan multilateralistik. Pengkajian modalitas Indonesia berada dalam segi regulasi & lembaga pertahanan serta keamanan maritim yang belum efisien dalam penegakan hukum di laut, juga kerangka kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang masih hanya aspirasi pragmatis, serta diplomasi pertahanan sektor maritimnya yang minim fleksibilitas. Demikian, Indonesia direkomendasikan untuk mencegah keberpihakan negara dan ASEAN, menjaga kepercayaan strategis dalam meningkatkan fungsionalitas kerja sama, menjaga kedaulatan maritim dan ekonomi, menguatkan peran Indonesia bersama ASEAN, hingga menguatkan keamanan maritimnya.

Klaus Raditio menanggapi hasil penelitian tersebut dengan menekankan bahwa Indonesia tidak dapat bergantung pada entitas lain sehingga harus memosisikan diri. Dalam mengomentari uji statistik, Klaus menyayangkan variabel - variabel yang tidak konklusif dalam memproyeksikan skenario mendatang. Di samping itu, terdapat hal yang kurang tepat terkait pernyataan bahwa hanya pemikiran politik Xi Jinping yang diadopsi sebagai ideologi negara. Hal ini disebabkan pandangan tambahan yakni

adanya pemikiran - pemikiran lain seperti Mao Zhedong, Deng Xiaoping, Jiang Zheming, dan Hu Jintao yang juga diadopsi dalam ideologi dan doktrin negara serta partai, hanya saja nama tidak dicantumkan. Klaus melanjutkan pendapatnya dengan membicarakan pertegasan *red line* oleh AS dan Tiongkok yang menghambat tercapainya kompetisi yang damai. Terlebih lagi, Tiongkok dan AS kini terlihat lebih ideologis di mana AS menekankan aliansi dan demokrasi sedangkan Tiongkok menekankan kebangkitan kembali Tiongkok yang kemudian mengarah ke reunifikasi Taiwan. Terkait peran Indonesia dalam hubungan AS-Tiongkok, Klaus menyampaikan pentingnya bagi Indonesia untuk meningkatkan aktivitas di perairan Natuna dan tidak hanya mengembangkan kapasitas. Kemudian diplomasi terhadap ASEAN pun harus dioptimalkan. Klaus melihat bahwa kini saatnya bagi Indonesia untuk mengedepankan diplomasi terutama di ASEAN khususnya terkait kepatuhan pada UNCLOS, jaminan resolusi terhadap Myanmar, dan kohesivitas ASEAN.

Dilanjutkan oleh tanggapan dari Adrianus Harsawaskita, dilihat bahwa riset kurang menjelaskan isu - isu spesifik yang harus disikapi oleh Indonesia seperti kasus Laut Cina Selatan, Taiwan, dan lainnya, juga terdapat pembahasan terkait ASEAN yang cenderung mendadak. Terlebih, studi strategis dinilai Adrianus penting untuk membahas skenario terburuk yakni perang yang belum cukup diperdalam oleh penelitian. Hasil riset yang menyatakan hubungan *decoupling* antar AS-Tiongkok pun dikatakan sangat terkait dengan Indonesia sebagaimana membuka kesempatan untuk industrialisasi hingga menjadi hulu dalam rantai pasokan global. Dalam skenario rivalitas, Indonesia perlu reaktualisasi konsep bebas aktif, terutama pada 2045 mendatang, dan mengidentifikasi implementasi konsep tersebut dalam konteks tertentu. Adrianus kemudian membandingkan posisi Indonesia dalam rivalitas tersebut dengan konteks Kuba pada perang dingin. Dalam konteks yang sama, Adrianus mengkaji pentingnya peran lembaga intelijen AS dan Tiongkok yang belum dibahas mengingat besarnya pengaruh CIA dan KGB dalam perang dingin yang kemudian berimplikasi pula pada *middle power* layaknya Indonesia. Pertarungan wacana juga menjadi signifikan seperti ide demokrasi yang berbeda antar AS dan Tiongkok yang kemudian menuntut Indonesia untuk memilih. Namun, Indonesia pun harus berani dalam membuat kebijakan luar negeri yang memaksimalkan

pencapaian kepentingan nasional daripada memperhatikan netralisme dan konsistensinya.

Menanggapi komentar Adrianus dan Klaus, Ali Wibisono mengklarifikasi keterbatasan kerangka analisis terkait teori transisi kekuatan. Mengacu pada komentar tentang perbandingan perang dingin, Ali menekankan domain maritim sebagai mandala utama rivalitas AS dan Tiongkok yang berbeda dengan kondisi AS-Uni Soviet masa sebelumnya. Dengan demikian, pembahasan *Code of Conduct* melalui ASEAN yang dikritisi muncul secara mendadak menjadi penting. Ali pun menyatakan signifikansi pengkajian skenario krisis seperti halnya Taiwan, Korea, Laut Cina Selatan, termasuk blokade selat Malaka bagi proyeksi kebijakan Indonesia pada 2045 mendatang.

Pada sesi tanya jawab, Mutti Anggita mencatat serangkaian pertanyaan yang salah satunya terkait peran kebijakan siber dalam menanggapi *splinternet* di *cybersecurity* pada masa depan mengingat pula munculnya teknologi seperti *quantum computer* dan *technology chip*. Di samping itu, juga terdapat pertanyaan seputar analisis yang menekankan pada konsep *hedging*. Terdapat pun informasi lain tentang keuntungan bagi Indonesia dalam kondisi hubungan 'negatif' AS dan Tiongkok yang kemudian menimbulkan pertanyaan akan skenario ideal bagi Indonesia apabila hubungan kedua negara tersebut membaik. Terakhir, Mutti memfasilitaskan pertanyaan terkait kemampuan bersaingnya Indonesia terlepas dari ketergantungan pada negara - negara lain.

Menanggapi pertanyaan - pertanyaan tersebut, Ali Wibisono menyampaikan kondisi di mana *splinternet* AS dan Tiongkok menekan secara bersamaan dan semakin nyata dalam keamanan siber. Bahkan, Ali memaparkan bahwa *broadband subscription* di Tiongkok yang mengalahkan AS juga menjadi pertanda dari *splinternet* hingga kemandirian teknologi yang dibangun oleh Tiongkok. Klaus Raditio kemudian menyampaikan bahwa isu Google yang mengancam ketidakinginan untuk kerjas ama dengan Huawei menunjukkan sekuritisasi teknologi sebagai alat pertahanan. Indonesia sendiri pun sudah berani membangun *smelter* di Papua dan Gresik sehingga menggeser Indonesia ke arah hilir dalam rantai pasokan global.

Terkait konsep *hedging*, Ali Wibisono sebagai ketua peneliti menyatakan bahwa riset tidak membahas hal tersebut secara teoretis dan memfokuskan pada skenario pada

masa mendatang. Sedangkan konsep *hedging* cenderung membahas respons negara hingga menjadi agenda baru untuk pembahasan yang kemudian mendorong pentingnya analisis media sosial.

Adrianus Harsawaskita menjawab pertanyaan terkait skenario ideal bagi Indonesia dalam kondisi hubungan AS Tiongkok yang membaik dengan mengusulkan penyesuaian kebijakan Indonesia dengan yang paling menguntungkan dan berpihak pada pihak yang menguntungkan nusantara. Klaus Raditio menambahkan agar Indonesia berpijak pada prinsip bebas aktif sesuai pada *bargaining power* yang kita miliki. Ketika *bargaining power* kita lemah, maka Indonesia akan 'bermain mata' dengan AS dan Tiongkok bersamaan. Namun apabila *bargaining power* kita tinggi, maka Indonesia hanya akan melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya. Muhammad Arif juga kemudian merespons tentang komentar Klaus terkait *red line* yang menebal di mana hal tersebut menjadi kabar baik karena dapat mengurangi mispersepsi sehingga situasi menjadi lebih mirip dengan perang dingin yang parameternya lebih jelas. Namun Arif juga menekankan relevansi dari revitalisasi aspirasi multilateralisme aliansi seperti AUKUS dan Quad yang kemudian lebih mirip dengan perang dunia I. Dua tren tersebut bertolak belakang namun di luar itu, tetap ada konsep perang dan damai yang harus dikaji ulang secara konseptual dan operasional bersama.

Broto Wardoyo kemudian merespons akan pertanyaan tentang kemampuan Indonesia untuk bersaing di luar ketergantungan dengan lebih menekankan pada keinginan Indonesia sendiri untuk bersaing ataupun tidak dan kapan Indonesia sudah bisa dinyatakan memiliki kemampuan tersebut. Walaupun kapabilitas dan keikutsertaan Indonesia lebih terbatas dibandingkan negara besar AS dan Tiongkok tapi tetap pengkajian akan ruang gerak Indonesia harus dilakukan. Ali Wibisono kemudian berpendapat bahwa Indonesia harus meningkatkan kehadirannya di forum hubungan internasional seperti menegaskan hukum internasional ZEE demi masyarakat yang terlibat dalam sektor perikanan. Ali kemudian memaparkan kondisi Indonesia dalam rivalitas AS-Tiongkok yang mendorong peran Indonesia dalam ASEAN, juga ketidakberpihakannya.

Kolaborasi antara



Jl. Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Selasa, 22 Desember  
2021

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id